

## **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)**

<sup>1</sup>Sulis Septiani, <sup>2</sup>Wirmie Eka Putra, <sup>3</sup>Fitrini Mansur

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi

Corresponding author: sulisseptiani17@gmail.com

### **Keywords:**

*Role of Village Apparatus, Competence, Community Participation, Accountability of Village Fund Management, Siskeudes*

### **Article history:**

*Received January 2025*

*Revised April 2025*

*Accepted April 2025*

### **ABSTRACT**

*This study aims to identify factors that influence the accountability of village fund management, using the Village Financial System (Siskeudes) as an intervening variable. The population includes village officials from 18 villages in Pemayung District, with 72 respondents consisting of Village Heads, Village Secretaries, Village Treasurers, and BPD members. Using a quantitative approach, data were collected through questionnaires and analyzed with PLS-SEM using SmartPLS software. The results show that the role of village officials and community participation do not directly affect accountability. However, the competence of village officials and the use of Siskeudes have a positive effect on accountability. The role of village officials positively influences the use of Siskeudes, while competence negatively affects it. Community participation does not affect the use of Siskeudes. Furthermore, the role and competence of village officials influence accountability through the application of Siskeudes, but community participation does not.*

## **Pendahuluan**

Dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Tuntutan mengenai akuntabilitas ini menjadi perhatian khusus dalam lingkup akuntansi pemerintahan. Fenomena yang muncul dalam perkembangan sektor publik Indonesia saat ini adalah meningkatnya tuntutan publik akan akuntabilitas lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah (Putra, 2017). Semakin besar Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah pusat, maka semakin besar pula tanggungjawab pemerintah desanya. Besarnya Dana Desa yang diperoleh dapat memicu terjadinya penyalahgunaan sehingga rentan terjadi korupsi. Berdasarkan studi kasus team Litbang Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) dilapangan, beberapa indikator penyebab terjadinya korupsi atau penyelewengan Dana Desa adalah minimnya kompetensi perangkat pemerintah desa, kurang adanya pengawasan masyarakat, dan minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi Siskeudes.

Peran perangkat desa merupakan keterlibatan yang dimiliki perangkat desa dalam membantu Kepala Desa membuat suatu kebijakan dan rencana yang ada di pemerintahan desa serta memiliki peran penuh dalam melaksanakan aturan atau

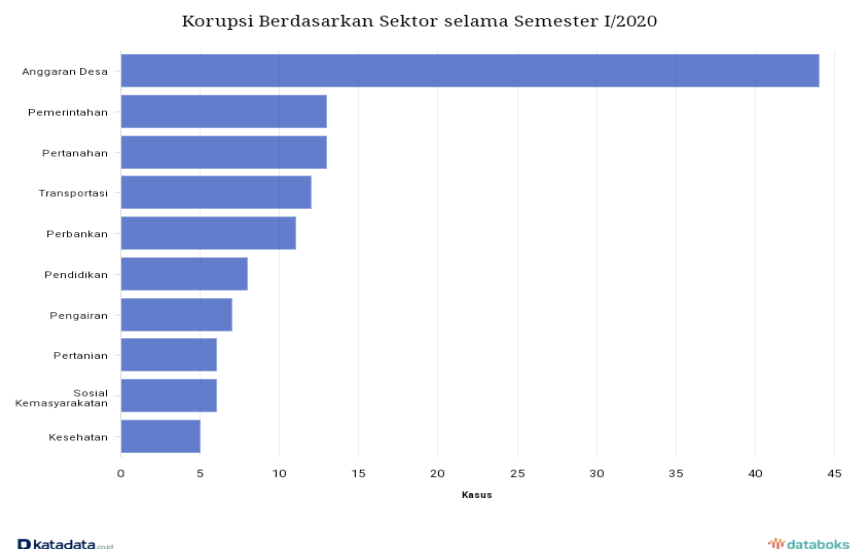
kebijakan yang telah dibuat (Ramadhan & Arza, 2021). Untuk mengelola Dana Desa aparat desa harus memiliki kompetensi yang memadai. Menurut (Putra et al., 2021) sumber daya manusia merupakan sesuatu yang sangat utama dalam proses menjalankan organisasi untuk sampai pada tujuannya. Pengelolaan Dana Desa membutuhkan partisipasi masyarakat, karena salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa merupakan salah satu solusi dalam mencapai akuntabilitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan misinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban yang dilakukan secara rutin. Dengan kata lain akuntabilitas merupakan sebuah pengatur yang dimiliki oleh aparat desa yang berhubungan dengan tugas pemerintah desa dan menjadi sebuah bukti pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai upaya untuk menghindari berbagai permasalahan yang bisa saja terjadi didalam proses pengelolaan Dana Desa seperti kecurangan dan penyelewengan.

Sejak pertama kali dicairkannya Dana Desa dari tahun 2015 hingga tahun 2020 cenderung meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah anggaran Dana Desa setiap tahunnya, menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa tersebut secara mandiri, efektif, dan efisien (Anggraeni & Yuliani, 2019). Semakin besar Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah pusat, maka semakin besar pula tanggungjawab pemerintah desanya. Besarnya Dana Desa yang diperoleh dapat memicu terjadinya penyalahgunaan sehingga rentan terjadi korupsi.

Sejak disalurkanannya Dana Desa dari tahun 2015, tidak sedikit pemerintah desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan Dana Desa. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2015-2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat desa. Pada semester I/2020 tercatat kasus korupsi sebanyak 169 kasus. Dari jumlah tersebut, korupsi disektor anggaran desa paling banyak terjadi yaitu 44 kasus (Bayu, 2020). Menurut Kepala Bakeuda Batanghari, M Azan mengatakan bahwa pada pencairan anggaran Dana Desa pada tahun 2019 ada 4 (empat desa) yang belum menyelesaikan administrasi berupa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) sehingga Dana Desa tahap pertama tidak bisa dicairkan, karena penyelesaian rekapitulasi APBDDes merupakan salah satu syarat administrasi dari pencairan Dana Desa. Dua desa diantara desa tersebut berada di Kecamatan Pema

yang yaitu Desa Kuap dan Desa Kampung Pulau (Afriandi, 2019). Kemudian menurut (Rayyan, 2019) dalam berita yang dilansir dari BatanghariNews.com juga terdapat salah satu desa di Kecamatan Pelayung yang belum bisa dicairkan Dana Desa tahap ketiganya karena terkendala SPJ dari masing-masing desa yang belum masuk atau belum di verifikasi oleh pejabat yang berwenang.



Source: Databoks

### Gambar 1.1

Data korupsi berdasarkan sektor semester I/2020

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pihak pemerintah desa tidak menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterlibatan pemerintah desa mengenai surat pertanggung jawaban. Permasalahan lain mengenai pengelolaan dana desa juga cukup banyak terjadi pada beberapa desa di Kecamatan Pelayung, mulai dari temuan indikasi penyelewengan yang berasal dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terkait pengerjaan jalan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga tidak adanya transparansi terkait pengelolaan dana desa.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dari Peran Perangkat Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Penerapan Siskeudes sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Bawono & Kinasih, 2020) yang berjudul *"Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES)"*. Hasil penelitian (Bawono & Kinasih, 2020) menunjukkan bahwa peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan pene

rapan Siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran perangkat desa dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap implementasi penerapan Siskeudes. Serta implementasi penerapan Siskeudes mampu memediasi hubungan antara peran perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Teori *Stewardship***

Menurut (Hamdani, 2016) teori *stewardship* merupakan teori yang didasarkan pada tingkah laku dan premis. Teori *stewardship* ini menggambarkan situasi dimana para manajer atau eksekutif sebagai *steward* atau bertindak sesuai keinginan *principal*. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) teori *stewardship* digambarkan sebagai teori yang dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi.

### **Peran Perangkat Desa**

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan pemerintah desa, pemerintah desa merupakan Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Indikator pengukuran variabel peran perangkat desa dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian (Indrianasari, 2017).

### **Kompetensi Perangkat Desa**

Menurut (Edison et al., 2016) kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*Knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*Attitude*). Kompetensi perangkat merupakan sebuah kapasitas atau keahlian yang dimiliki seorang perangkat Desa, dalam hal ini sebagai pengelola keuangan Desa. Adapun faktor-faktor yang dapat dikatakan sebagai pendukung dari kompetensi itu sendiri, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, serta *skill* yang dimiliki oleh aparatur (Juniarti et al., 2022). Indikator pengukuran variabel kompetensi perangkat desa dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian (Reu & Lasd, 2021).

### **Partisipasi Masyarakat**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemerintah daerah. Partisipasi diwujudkan dalam bentuk hak-hak seperti, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi, dan pelayanan yang sama serta adil. Menurut (Sujarweni, 2015), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Indikator pengukuran variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian (Reu & Lasd, 2021).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Indikator pengukuran variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian (Reu & Lasd, 2021).

### **Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang di kembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan atau pertanggung jawaban (BPKP, 2016). Indikator pengukuran variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian (Reu & Lasd, 2021).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut

(Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dan memenuhi kaidah ilmiah secara empiris, objektif, terukur, rasional, serta sistematis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari yang berjumlah 18 desa dengan kriteria responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa), dan Ketua atau Anggota BPD. Sampel penelitian dipilih menggunakan *sampling* jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 72 responden. Alat analisis yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* SmartPLS versi 3.2.9. Menurut (Ghozali & Latan, 2015) PLS merupakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berdasarkan komponen atau varians.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H<sub>1</sub>: Peran Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. H<sub>2</sub>: Kompetensi Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3. H<sub>3</sub>: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
4. H<sub>4</sub>: Penerapan Siskeudes Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
5. H<sub>5</sub>: Peran Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Penerapan Siskeudes
6. H<sub>6</sub>: Kompetensi Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Penerapan Siskeudes
7. H<sub>7</sub>: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Penerapan Siskeudes
8. H<sub>8</sub>: Peran Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Siskeudes
9. H<sub>9</sub>: Kompetensi Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Siskeudes
10. H<sub>10</sub>: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Siskeudes

## Hasil dan Pembahasan

Variabel dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) variabel laten yang terdiri dari 3 (tiga) variabel eksogen dan 1 (satu) variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini berupa variabel peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan partisipasi masyarakat. Variabel endogen dalam penelitian ini berupa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel mediasi dalam penelitian ini berupa variabel penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Di dalam penelitian ini, terdapat 36 (tiga puluh enam) indikator variabel yang akan diteliti oleh peneliti.



*Convergent Validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan pada korelasi antara *item score/component score* yang diestimasi menggunakan *software SmartPLS 3.2.9*. Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima. Dalam penelitian ini peneliti menentukan batas *loading factor* untuk indikator yang tetap masuk dalam model adalah nilai *loading factor* diatas 0,5.

**Table 1.** Hasil Analisis Outer Model Awal Penelitian

	X1	X2	X3	Y	Z
X1.1	0,770				
X1.2	0,772				
X1.3	0,811				
X1.4	0,577				
X1.5	0,267				
X1.6	0,758				
X2.1		0,404			
X2.2		0,716			
X2.3		0,721			
X2.4		0,557			
X2.5		0,776			
X2.6		0,749			
X3.1			0,536		
X3.2			0,792		
X3.3			0,540		
X3.4			0,821		
X3.5			0,821		
X3.6			0,822		
X3.7			0,830		
X3.8			0,526		
Y1				0,747	
Y2				0,745	
Y3				0,768	
Y4				0,717	
Y5				0,749	
Y6				0,767	
Y7				0,523	
Y8				0,454	
Z1					0,613
Z2					0,790
Z3					0,718
Z4					0,427
Z5					0,783
Z6					0,711
Z7					0,780
Z8					0,758

Source: Output SmartPLS versi 3.2.9

Tahap selanjutnya yaitu hasil analisis dari *outer loading* untuk model penelitian kedua pada Table 2 sebagai berikut.

**Table 2.**  
Hasil Analisis Outer Model Awal Penelitian Kedua

	X1	X2	X3	Y	Z
X1.1	0,774				
X1.2	0,727				
X1.3	0,811				
X1.4	0,571				
X1.6	0,755				
X2.2		0,725			
X2.3		0,725			
X2.4		0,563			
X2.5		0,768			
X2.6		0,744			
X3.1			0,518		
X3.2			0,786		
X3.3			0,530		
X3.4			0,816		
X3.5			0,817		
X3.6			0,823		
X3.7			0,832		
X3.8			0,513		
Y1				0,759	
Y2				0,763	
Y3				0,789	
Y4				0,719	
Y5				0,739	
Y6				0,781	
Y7				0,502	
Z1					0,626
Z2					0,798
Z3					0,714
Z5					0,781
Z6					0,704
Z7					0,784
Z8					0,755

Source: Output SmartPLS versi 3.2.9

Dapat dilihat bahwa seluruh indikator pada variabel laten penelitian ini sudah memiliki nilai *loading factor* diatas 0,5. Dengan demikian indikator-indikator tersebut merupakan indikator yang valid dan reliabel sebagai indikator yang merefleksikan variabel penelitian ini. *Discriminant validity* dapat digunakan untuk melihat perbedaan dari masing-masing variabel laten dengan variabel lainnya. Jika nilai *loading* dari setiap indikator sebuah variabel laten lebih besar dari nilai *loading* indikator variabel laten lainnya, maka model mempunyai *discriminant validity* yang baik.



Table 3. Hasil Analisis Cross Loading

	X1	X2	X3	Y	Z
X1.1	0,774	0,262	0,226	0,038	0,287
X1.2	0,727	0,022	0,105	-0,005	0,308
X1.3	0,811	0,247	0,222	-0,112	0,327
X1.4	0,571	0,177	0,170	-0,375	0,119
X1.6	0,755	0,262	0,005	-0,110	0,234
X2.2	0,271	0,725	0,249	0,107	-0,229
X2.3	0,212	0,725	0,268	0,052	-0,321
X2.4	0,300	0,563	0,359	0,002	-0,271
X2.5	0,056	0,768	-0,006	0,209	-0,357
X2.6	0,179	0,744	0,142	0,192	-0,189
X3.1	0,256	0,286	0,518	-0,052	0,010
X3.2	0,318	0,292	0,786	-0,035	-0,097
X3.3	0,209	0,145	0,530	-0,125	0,105
X3.4	0,293	0,249	0,816	-0,091	-0,094
X3.5	0,212	0,287	0,817	-0,118	-0,237
X3.6	0,161	0,078	0,823	-0,029	-0,161
X3.7	0,138	0,202	0,832	-0,100	-0,207
X3.8	0,397	0,230	0,513	0,018	0,094
Y1	-0,041	0,255	-0,012	0,759	0,072
Y2	-0,127	0,196	-0,128	0,763	0,085
Y3	-0,109	0,095	-0,177	0,789	0,106
Y4	-0,140	0,101	-0,029	0,719	0,056
Y5	-0,177	0,066	-0,027	0,739	0,092
Y6	-0,064	0,065	-0,112	0,781	0,248
Y7	-0,154	0,027	-0,075	0,502	0,044
Z1	0,202	-0,277	-0,176	0,276	0,626
Z2	0,176	-0,317	-0,361	0,108	0,798
Z3	0,259	-0,268	-0,175	-0,019	0,714
Z5	0,313	-0,342	-0,165	0,054	0,781
Z6	0,275	-0,339	-0,085	0,127	0,704
Z7	0,278	-0,251	-0,303	0,135	0,784
Z8	0,328	-0,267	-0,129	0,066	0,755

Source : Output SmartPLS versi 3.2.9

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa tiap indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya, dibandingkan dengan nilai *cross loading* di variabel lainnya. Hasil yang diperoleh tersebut, dapat diartikan bahwa indikator yang dipakai pada penelitian ini telah memiliki *Discriminant Validity* yang baik dalam menyusun variabelnya sendiri. *R-Square variabel* laten dependen dan *Q-square predictive relevance* digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya (Ghozali & Latan, 2015). Nilai *R-Square* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Table 4.** Hasil Analisis *R-Square*

	<i>R-square</i>	<i>Adjusted R-square</i>
Penerapan Siskeudes (Z)	0,774	0,262
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,727	0,022

Source: Output SmartPLS versi 3.2.9

Jika nilai *Q-Square* lebih besar dari 0, maka model tersebut dianggap memiliki nilai *predictive* yang relevan. Berikut rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai *predictive-relevance*:

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R^2)(1 - RR^2) \\
 &= 1 - (1 - 0,448) \times (1 - 0,226) \\
 &= 1 - (0,552 \times 0,774) \\
 &= 1 - 0,427 \\
 &= 0,573
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh nilai *Q-Square* sebesar  $0,573 > 0$ , yang berarti bahwa penelitian ini memiliki nilai *predictive* yang relevan. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel melalui prosedur *Bootstrapping*. caranya adalah melihat nilai t-statistik atau sig (*p-value*). Nilai t-statistik yang berada diatas nilai 1,96 atau sig.  $< 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima.

**Table 5.** Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1 -> Y	-0.463	-0.397	0.253	1.829	0.068
X1 -> Z	0.533	0.480	0.163	3.266	0.001
X2 -> Y	0.491	0.494	0.170	2.895	0.004
X2 -> Z	-0.474	-0.473	0.114	4.167	0.000
X3 -> Y	0.006	-0.057	0.194	0.029	0.977
X3 -> Z	-0.258	-0.173	0.194	1.330	0.184
Z -> Y	0.507	0.507	0.171	2.967	0.003
X1 -> Z -> Y	0.270	0.241	0.113	2.386	0.017
X2 -> Z -> Y	-0.240	-0.245	0.106	2.258	0.024

Source : Output SmartPLS versi 3.2.9

## Pembahasan

### Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peran perangkat desa tidak memiliki pengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan & Arza, 2021), yang menyebutkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Penerapan Siskeudes**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap penerapan Siskeudes. Melalui peran perangkat desa yang maksimal penerapan Siskeudes akan berjalan dengan lancar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap penerapan Siskeudes. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bawono & Kinasih, 2020) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi penerapan Siskeudes di pemerintahan desa.

### **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin kompeten perangkat desa maka akan semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menyebutkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Reu & Lasd, 2021) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Penerapan Siskeudes**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh negatif terhadap penerapan Siskeudes. Semakin tinggi kompetensi atau kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan desa maka mampu meningkatkan efektivitas penerapan Siskeudes (Suryaningsih & Adiputra, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Bawono & Kinasih, 2020), yang menyatakan bahwa Siskeudes sebagai teknologi sistem informasi akuntansi terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan dana desa, dimana pelaksanaannya harus didukung oleh kompetensi perangkat desa agar mampu mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat tidak dapat meningkatkan tanggung jawab pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luthfiani et al., 2020), yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi bukan merupakan suatu jaminan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Siskeudes**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap penerapan Siskeudes. Artinya partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi jalannya penerapan sistem keuangan desa. Hal ini berarti bahwa sistem keuangan desa bukanlah suatu hal yang menjadi perhatian masyarakat desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati et al., 2021), yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penerapan Sistem keuangan desa.

### **Pengaruh Penerapan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penerapan Siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah penerapan Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa yang akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kinasih et al., 2019), yang menyebutkan bahwa penerapan Siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengandung arti bahwa semakin aplikasi Sistem Keuangan Desa ini diterapkan dengan baik akan semakin menghasilkan laporan yang berkualitas sehingga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan bantuan teknologi Sistem Keuangan Desa yang telah dikembangkan saat ini, laporan yang dihasilkan tentu akan semakin baik dan berkualitas. Selain itu, penggunaan teknologi Sistem Keuangan Desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan

efisien. Hal ini dapat semakin menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta mewujudkan *good governance*.

### **Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Siskeudes**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes. Artinya secara tidak langsung penerapan Siskeudes mampu mempengaruhi hubungan antara peran perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bawono & Kinasih, 2020), yang menyebutkan bahwa penerapan Siskeudes mampu memediasi hubungan antara peran perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Siskeudes**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes. Artinya secara tidak langsung penerapan Siskeudes mampu mempengaruhi hubungan antara kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bawono & Kinasih, 2020), yang membuktikan bahwa implemementasi Siskeudes memediasi hubungan antara kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Siskeudes**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes. Artinya penerapan Siskeudes tidak mampu mempengaruhi hubungan antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati et al., 2021), yang membuktikan bahwa Siskeudes mampu memediasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan kompetensi perangkat desa dan penerapan Siskeudes berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap penerapan Siskeudes. Kompetensi perangkat desa berpengaruh negatif terhadap penerapan Siskeudes. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap penerapan Siskeudes. Peran perangkat desa dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes.

### Daftar Pustaka

- Afriandi, R. A. (2019). *Empat Desa di Batanghari Belum Terima Dana Desa*. TribunJambi.Com.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). *The Effect Of Human Resource Competency, Utilization Of Information Technology, Participation Budgeting, Supervision And Role Village Device On Accountability Village Fund Management (Empirical Study of Villages in Kajoran District) Pengaruh Kompetensi Su*.
- Bawono, I. R., & Kinasih, A. D. M. (2020). *Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES)*. *Journal of Accounting and Investment*, 21(3), 472–491. <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Bayu, D. J. (2020). *Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020*. Databoks.
- BPKP. (2016). *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi*. Alfabeta.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance (Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis)*. Mitra Wacana Media.
- Indrianasari, N. T. (2017). *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1 No 2, 29–46.
- Juniarti, U., Inapty, B. A., & Rakhmawati, I. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Risma*, 2(3), 608–620.
- Kinasih, A. D. M., Bawono, I. R., & Faturokhman, A. (2019). *Pengaruh Peran dan Kompetensi Perangkat Desa serta Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa*



- terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal. Universitas Jendral Soedirman*.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886–1899.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215–234.
- Putra, W. E. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2), 282–293.
- Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional , Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi ). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(02), 181–187.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Peoceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 148–161.
- Ramadhan, W., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(4), 822–835.
- Rayyan, E. (2019). *Terkendala SPJ, 17 Desa di Batanghari Tidak Bisa Cairkan ADD Tahap 3*. Batangharinews.Com. <https://batangharinews.com/read/2019/10/27/1398/terkendala-spj-17-desadi-batanghari-tidak-bisa-cairkan-add-tahap-3>
- Reu, F. M., & Lasd, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Saki: Studi Akuntansi Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. jakarta: alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Suryaningsih, N. K., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Partisipasi Pengguna, dan Usability System terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 11(1), 34–46.